

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL DI INDONESIA

Angga Sulaiman

Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Nasional
angga_nelwan@yahoo.co.id

Abstract

The rapid phenomenon of city growth is not only happening in Indonesia, it is also experienced in various countries in the world, where urbanization is suspected to be a major factor of rapid growth. In the context of Indonesia, the urban conditions of today are confronted by the complexity of the problems within which indicate urban environmental degradation. So this paper will describe the direction of policies and strategies of urban development in Indonesia that aims to provide an overview of national urban development efforts. Using descriptive methods, information is obtained from a variety of relevant documents that will explicitly describe City Vision and Mission 2050, regulatory framework, strategic issues, policy directions, targets and urban development strategies based on the National Medium Term Development Plan 2015 - 2019.

Keywords: *City, Urban and Urban Development*

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Komitmen membangun dan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat telah tercatat jauh sejak awal Indonesia merdeka, seperti dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Komitmen tersebut kemudian diterjemahkan dalam berbagai dimensi kehidupan, diawali dengan pembentukan lembaga negara dan atau struktur pemerintahan yang kepadanya melekat fungsi pelayanan. Dalam dekade yang relatif bersamaan sejalan dengan konsep *welfare state* maka dikenal dengan istilah pelayanan publik (*public service*).

Pelayanan publik dalam pemahaman Ryaas Rasyid (1997: 116) berkenaan dengan usaha pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang menjamin bahwa warga masyarakat dapat melaksanakan kehidupan mereka secara wajar, dan ditujukan juga untuk membangun dan memelihara keadilan dalam masyarakat. Hemat penulis pandangan Rasyid terkait pelayanan publik setidaknya memiliki dua penekanan utama yakni

menjamin kehidupan dan membangun/memelihara keadilan di tengah masyarakat, meskipun kita dapat berbeda tafsir terkait kondisi yang diharapkan.

Pada konteks yang lebih umum Miriam Budiardjo (2000: 45) menyebutkan tujuan akhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, common weal*). Maka dari itu, kondisi yang diharapkan baik wajar atau lebih dari sekedar wajar menjadi pintu masuk untuk menegaskan perlunya *Institutional Guarantee* bahwa, rakyat merupakan objek yang harus dilayani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peter H. Lindert & Thomas A. Pugel (1996: 5) diawal pengantar bukunya, pada bagian *Economics and the Nation State* juga menegaskan bahwa: “*For every country there is a whole set of national policies. And every country, those policies will always be designed to serve some part of the national constituency*”. Dengan demikian maka postulatnya menjadi, eksistensi sebuah negara akan ditentukan dari sejauhmana kualitas pelayanan terhadap warga negaranya.

Menyoal pelayanan publik oleh Pemerintah RI, kita akan berhadapan dengan angka-angka yang secara tidak langsung menunjukkan rentang pelayanan yang begitu luas. Angka-angka tersebut yakni sebaran Indonesia yang memiliki lebih dari 740 suku bangsa/etnis dengan 17.504 pulau meguntai menjadi jamrud katulistiwa, dengan panjang garis pantai sepanjang 95.181. Dimana secara administratif terdiri dari 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota. Fakta lainnya bahwa negeri ini kaya akan sumber daya alam baik darat maupun laut (gemah ripah loh jinawi) ditambah dengan bonus demografi pada tahun 2020 mendatang, seyogianya mampu menjadi modal untuk membangun Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju.

Memang bukan pekerjaan mudah dalam mengelola Indonesia, mengingat letak geografis yang dipisah sekaligus disatukan oleh lautan serta heterogenitas yang tidak dimiliki oleh negara lain. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik penduduk Indonesia pada tahun 2015 lebih kurang berjumlah 255,46 juta jiwa dan diproyeksi menjadi 305,65 juta pada tahun 2035, secara rinci sebagaimana Tabel 1.1 dibawah ini yang dirujuk dari website BPS.go.id:

Tabel 1.1
Proyeksi Penduduk Menurut Provinsi, 2010 – 2035 (Dalam Ribuan).

Provinsi	Tahun					
	2010	2015	2020	2025	2030	2035
Aceh	4523,10	5002,00	5459,90	5870,00	6227,60	6541,40
Sumatera Utara	13028,70	13937,80	14703,50	15311,20	15763,70	16073,40
Sumatera Barat	4865,30	5196,30	5498,80	5757,80	5968,30	6130,40
Riau	5574,90	6344,40	7128,30	7898,50	8643,30	9363,00
Jambi	3107,60	3402,10	3677,90	3926,60	4142,30	4322,90
Sumatera Selatan	7481,60	8052,30	8567,90	9000,40	9345,20	9610,70
Bengkulu	1722,10	1874,90	2019,80	2150,50	2264,30	2360,60
Lampung	7634,00	8117,30	8521,20	8824,60	9026,20	9136,10
Kepulauan Bangka Belitung	1230,20	1372,80	1517,60	1657,50	1788,90	1911,00
Kepulauan Riau	1692,80	1973,00	2242,20	2501,50	2768,50	3050,50
Pulau Sumatera	50860,30	55272,90	59337,10	62898,60	65938,30	68500,00
DKI Jakarta	9640,40	10177,90	10645,00	11034,00	11310,00	11459,60
Jawa Barat	43227,10	46709,60	49935,70	52785,70	55193,80	57137,30
Banten	10688,60	11955,20	13160,50	14249,00	15201,80	16033,10
Jawa Tengah	32443,90	33774,10	34940,10	35958,60	36751,70	37219,40
DI Yogyakarta	3467,50	3679,20	3882,30	4064,60	4220,20	4348,50
Jawa Timur	37565,80	38847,60	39886,30	40646,10	41077,30	41127,70
Pulau Jawa	137033,30	145143,60	152449,90	158738,00	163754,80	167325,60
Bali	3907,40	4152,80	4380,80	4586,00	4765,40	4912,40
Nusa Tenggara Barat	4516,10	4835,60	5125,60	5375,60	5583,80	5754,20
Nusa Tenggara Timur	4706,20	5120,10	5541,40	5970,80	6402,20	6829,10
Bali dan Kep. Nusa Tenggara	13129,70	14108,50	15047,80	15932,40	16751,40	17495,70
Kalimantan Barat	4411,40	4789,60	5134,80	5432,60	5679,20	5878,10
Kalimantan Tengah	2220,80	2495,00	2769,20	3031,00	3273,60	3494,50
Kalimantan Selatan	3642,60	3989,80	4304,00	4578,30	4814,20	5016,30
Kalimantan Timur	3576,10	4068,60	4561,70	5040,70	5497,00	5929,20
Pulau Kalimantan	13850,90	15343,00	16769,70	18082,60	19264,00	20318,10
Sulawesi Utara	2277,70	2412,10	2528,80	2624,30	2696,10	2743,70
Sulawesi Tengah	2646,00	2876,70	3097,00	3299,50	3480,60	3640,80
Sulawesi Selatan	8060,40	8520,30	8928,00	9265,50	9521,70	9696,00
Sulawesi Tenggara	2243,60	2499,50	2755,60	3003,00	3237,70	3458,10
Gorontalo	1044,80	1133,20	1219,60	1299,70	1370,20	1430,10

Sulawesi Barat	1164,60	1282,20	1405,00	1527,80	1647,20	1763,30
Pulau Sulawesi	17437,10	18724,00	19934,00	21019,80	21953,50	22732,00
Maluku	1541,90	1686,50	1831,90	1972,70	2104,20	2227,80
Maluku Utara	1043,30	1162,30	1278,80	1391,00	1499,40	1603,60
Kep. Maluku	2585,20	2848,80	3110,70	3363,70	3603,60	3831,40
Papua Barat	765,30	871,50	981,80	1092,20	1200,10	1305,00
Papua	2857,00	3149,40	3435,40	3701,70	3939,40	4144,60
Pulau Papua	3622,30	4020,90	4417,20	4793,90	5139,50	5449,60
INDONESIA	238518,80	255461,70	271066,40	284829,00	296405,10	305652,40

Dari jumlah tersebut lantas bagaimana sebarannya? Masih merujuk data dari sumber yang sama, bahwa pada tahun 2010 persentase penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan sejumlah 49,8 kemudian menjadi 53,3 ditahun 2015. Sedangkan proyeksi secara berturut-turut pada tahun 2020, 2025, 2030 hingga tahun 2035 sejumlah 56,7 - 60,0 - 63,4 dan 66,6 yang artinya laju pertumbuhan penduduk kota dengan presentase 2,75 per tahun lebih besar daripada pertumbuhan penduduk nasional yang hanya berjumlah 1,17 per tahun.

Fenomena pesatnya pertumbuhan kota bukan hanya terjadi di Indonesia hal serupa juga dialami oleh berbagai negara, pada kasus Indonesia dan berbagai negara lainnya faktor utama yang menengarai pertumbuhan tersebut adalah urbanisasi dan hampir semua literatur yang fokus membahas perkotaan tidak absen mengangkat isu urbanisasi dalam kajiannya. Sebut saja William A. Schwab yang menulis buku berjudul *URBAN SOCIOLOGY A Human Ecological Perspektif* di tahun 1982, dia memasukkan isu urbanisasi dibagian ke-1 dengan sub judul *The Urbanization Process*.

Contoh lain dari literatur kekinian, dalam buku yang diterbitkan tahun 2012 dengan judul *CITIES AND URBAN LIFE* yang ditulis oleh John J. Macionis & Vincent N. Parrillo. Isu urbanisasi juga dimasukan dalam bagian ke-1 dengan sub judul *Understanding The City: Its Origin and Development*. Lepas dari isu urbanisasi, mengingat kota di Indonesia dengan laju pertumbuhan yang luar biasa idealnya kota harus mampu menjadi *national growth engine*.

Pertanyaannya kemudian bagaimana wajah perkotaan di Indonesia? Menjawab pertanyaan tersebut, ada tulisan menarik yang disampaikan oleh Damsar (2017: 182 – 184) yang sekurang kurangnya memberika gambaran terkait potret perkotaan di Indonesia. Beliau melakukan pemetaan setidaknya terdapat 4 contoh kasus yang menunjukkan paradoks perkotaan sebagaimana berikut beserta beberapa penjelasan setelahnya:

- a. Perumahan Mewah Versus Perumahan Kumuh
- b. Ekonomi Formal Versus Ekonomi Informal
- c. Ruang Privat Versus Ruang Publik
- d. Transportasi Pribadi Versus Transportasi Umum

Pertama, perumahan mewah versus perumahan kumuh. Menurut Soemantri dalam Damsar, Kota dalam perspektif penguasa adalah kawasan yang moderen baik struktur maupun infrastrukturnya. Oleh sebab itu, pembangunan perumahan mewah dan pasar moderen berjangkauan nasional menjadi salah satu prioritas pembangunan kota. Lajut Damsar, di Indonesia pembangunan sebagaimana dimaksud terutama pada kota yang berusia tua seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar dan lainnya, secara umum tidak dilakukan dilahan kosong. Melainkan dibangun pada lahan yang telah ditempati sebelumnya oleh warga, oleh karnanya kebanyakan kebijakan dari pemerintah kota adalah membangun dengan menggusur. Dicontohkan oleh Damsar bahwa, dalam membangun rumah kaya/mewah (slum) maka yang dilakukan dengan menggusur rumah kumuh (squatter) hingga warga menjadi tuna wisma karna kompensasi tidak sesuai, inilah satu dari salah empat paradoks yang dimaksudkan di atas.

Masih dalam rujukan yang sama, proses pembangunan dengan menggusur merupakan proses pembangunan tanpa hati nurani, karena warga kota dicabut dari akar kehidupan sosial – ekonomi dan budayanya. Di Jakarta, penggusuran sudah terjadi sejak jaman kolonial hingga hari ini. Pembangunan kompleks Menteng oleh Pemerintah Kolonial Belanda di tahun 1930-an hingga digugat oleh Husni Tamrin. Walikota Sudiro pada rezim Orde lama menggusur di sekitar kawasan Hotel Indonesia pada tahun 1950-an hingga di protes oleh Bung Hatta. Pada rezim Orde Baru, Gubernur Ali Sadikin menggusur dengan menggunakan cara persuasif dan penuh dialog disamping memperhatikan ganti rugi dan kebutuhan warga sebelum tempat mereka digusur. Ironisnya, di Era Reformasi penggusuran yang paling brutal dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dimana pada tahun 2015 terdapat 113 kasus penggusuran paksa yang merugikan 8.315 kepala keluarga dan 600 unit usaha.

Kedua, ekonomi formal versus ekonomi informal. Paradoks ekonomi dualistik muncul kembali setelah konsep informal ekonomi disuarakan oleh Keith Hart yang kemudian melahirkan tiga dikotomi yakni ekonomi formal, ekonomi informal dan ekonomi ilegal. Castells dan Portes dalam Damsar (2017: 192) memberikan penjelasan kepada ketiganya terkait sah atau tidaknya proses produksi, distribusi dan produk akhir sebagaimana berikut:

- a. Tipe ekonomi formal, apabila suatu aktivitas ekonomi dilakukan secara sah dalam proses produksi dan distribusi serta produk akhirnya sah;

- b. Tipe ekonomi informal, apabila suatu aktifitas ekonomi dilakukan secara tidak sah dalam proses produksi dan distribusi, namun produk akhirnya sah seperti pedagang asongan;
- c. Tipe ekonomi ilegal, apabila suatu aktifitas ekonomi dilakukan secara sah dan/atau tidak sah sementara produk akhirnya dipandang sebagai sesuatu yang tidak sah seperti minuman keras.

Sedangkan paradoksial dari ekonomi informal yang dimaksudkan dalam bagian ini sebagaimana merujuk pendapat Portes adalah usaha negara untuk melenyapkan ekonomi informal dan memperluas sektor formal melalui ekspansi hukum dan kontrol justru menimbulkan kemunculan aktivitas ekonomi informal baru yang bergerak “di bawah tanah”. Damsar (2017: 208).

Ketiga, ruang privat versus ruang publik. Ketika menyoal isu ini, persoalan yang prinsipil dalam paradoks yang terjadi adalah hampir terjadi disemua kota di Indonesia bahwa ruang publik digantikan atau ditukargulingkan oleh ruang pribadi seperti *Mall*, supermarket atau lapangan golf dengan belasan lubang. Kebijakan pemerintah kota seperti ini menyebabkan warga kota tidak memiliki arena rekreasi yang gratis, lebih dari itu juga kehilangan arena integrasi sosial dan sosialisasi untuk memperoleh nilai-nilai yang penting dan berharga bagi kehidupan termasuk didalamnya pada konteks kanalisasi konflik. Damsar (2017: 218)

Mudah untuk memahami logika di atas, mari kita lihat kasus DKI Jakarta dimana daerah yang memiliki garis pantai lebih dari 50 KM. Umumnya warga yang tinggal di pesisir dapat menikmati keindahan pantai, tapi faktanya hari ini pantai Jakarta telah menjadi milik pemodal. Warga Koja, Cilincing, Tanjung Priok, Pademangan, Penjaringan dan sekitarnya harus membayar untuk itu, belum lagi persoalan reklamasi yang sedang hangat dibicarakan yang juga di klaim dapat mencabut warga pesisir dari akar kehidupan sosial ekonomi dan kultural. Perlu digaris bawahi bahwa, ini bukan hanya persoalan akses atau sekedar tiket masuk. Tetapi kita sedang bicara bagaimana kawasan/lingkungan hunian telah dipaksa kehilangan fungsinya, yang sebagaimana dimaksud Damsar bahwa ruang publik semestinya menjadi arena yang menumbuh kembangkan nilai-nilai kehidupan serta tata laku yang adiluhung.

Keempat, transportasi pribadi versus transportasi umum. Kenyataan bahwa transportasi umum pada kawasan perkotaan di Indonesia yang tidak layak, akhirnya mendorong penggunaan kendaraan pribadi yang pada gilirannya berdampak pada beban ekonomi warga dan tentunya kemacetan. Ketidaklayakan bisa kita artikan dengan tidak efektif karena moda transportasi tidak terintegrasi dengan baik, juga bisa kita artikan tidak nyaman bahkan tidak aman dan boleh juga diartikan kesemuanya sekaligus.

Problematika kemacetan sebagaimana yang hendak diatasi pemerintah (seperti membangun jalan bebas hambatan/tol) dipandang oleh Damsar (2017: 219) tidak juga menyelesaikan masalah. Hal tersebut disebabkan laju pertumbuhan kendaraan yang berdasarkan deret hitung tidak linier dengan pertumbuhan jalan yang berdasarkan deret ukur. Pada sisi lain, pembangunan struktur dan infrastruktur dalam konteks menghadirkan moda transportasi yang nyaman, aman, kerkoneksi dan terjadual dengan baik tidak tersentuh. Inilah paradoks transportasi perkotaan.

Disamping paradoks perkotaan sebagaimana dimaksud diatas, kehidupan kota-kota di Indonesia diwarnai oleh berbagai fenomena yang menggambarkan sengkabut persoalan kawasan perkotaan. Aspek ekonomi dengan kemiskinannya, transportasi dengan kemacetannya, lingkungan dengan polusi dan banjir di setiap tahunnya, pemukiman penduduk dengan kekumuhannya hingga kerawanan sosial dengan kriminalitas didalamnya, yang kesemua itu menunjukkan sisi gelap perkotaan disamping berbagai pesona dan “janji manis” yang ditawarkan.

Soal kemiskinan, berdasarkan data BPS jumlah penduduk miskin pada smester 2 (september) 2016 di Indonesia 27,76 juta jiwa dimana dari jumlah tersebut 10,48 juta tinggal di kawasan perkotaan. Soal kemacetan, disitus *Numbeo* dalam *Otosia.com* melakukan pemeringkatan kemacetan negara-negara di dunia, pada tahun 2015 Indonesia menempati peringkat ke-11 dengan estimasi *time indeks* saat macet selama 40,58 menit dan *traffic indeks rate* 177,91 tepat dibawah Brazil dan Argentina.

Soal polusi dan banjir, dalam data yang dipublikasikan oleh *m.greenpeace.org* pada semester pertama tahun 2016 tingkat polusi udara DKI Jakarta sangat mengkhawatirkan yaitu berada pada level 45 mg/m³ atau 4.5 kali dari ambang batas yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dimana kalkulasi terbaru menyebutkan polusi udara di Jakarta dapat menyebabkan kematian dini sekitar 190 orang per hari. Sedangkan untuk banjir di Jakarta, hanya cukup diguyur hujan beberapa jam saja dijamin banjir dimana-mana. Sebagaimana publikasi *detiknews* pada 21 Februari 2017, menyitir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (21/02/2017) bahwa pasca hujan deras terdapat 54 titik banjir di Ibu Kota yang menyebabkan ribuan rumah terendam hingga ketinggian 1,5 meter.

Soal pemukiman kumuh, menurut Tjuk Kuswartojo (2005: 184) pemukiman kumuh (*squatter area*) adalah pemukiman yang padat, kualitas konstruksi rendah, prasarana dan pelayanan pemukiman minim yang merupakan akibat dari kemiskinan. Menurut data BPS pada *update* 09 Februari 2015, jumlah desa/kelurahan menurut pemukiman kumuh di Indonesia sebanyak 4.508 dari total 82.190 desa/kelurahan, dimana jumlah tersebut akan bertambah jika ditambahkan pemukiman dibantaran/tepi sungai dan dibawah Sutet. DKI Jakarta sebagai ibu kota negara juga memiliki

persoalan yang sama, bahkan pada tahun 2009 terdapat 20 persen dari total 425 kilometer persegi luas pemukiman di DKI Jakarta sebagaimana penjelasan Fauzi Bowo saat peresmian program Bebenah Kampung di Kelurahan Pademangan Barat tanggal 10 Mei 2019 (kemendagri.go.id).

Soal tindak kriminal, m.detik.com mengutip Kapolda Metro Irjen M. Iriawan yang menyebutkan bahwa pada tahun 2016 waktu kejahatan (crime clock) megalami percepatan 8 detik, dari 12 menit 26 detik di tahun 2015 menjadi 12 menit 18 detik di tahun 2016. Artinya, pada tahun 2016 setiap 12 menit 18 detik terdapat satu kasus kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Serangkaian data di atas dapat kita pahami bahwa kota-kota di Indonesia sedang dihadapkan oleh kemunduran lingkungan kota (Urban Environment Degradation). Bintarto (Bintarto, 1989: 36) menulis dalam bukunya beberapa kota di Indonesia sudah nampak adanya gejala yang membahayakan dimana, kemunduran atau kerusakan lingkungan kota tersebut dapat dilihat dari dua aspek:

- a. Aspek fisik (environmental degradation of physical nature), yakni gangguan yang ditimbulkan dari unsur-unsur alam, misalnya pencemaran air, udara dan seterusnya.
- b. Aspek sosial-masyarakat (environmental degradation of societal nature), yakni gangguan yang ditimbulkan oleh manusianya sendiri hingga memunculkan kehidupan yang tidak tenang, tidak nyaman dan tidak tentram.

Jika hari ini kota-kota di Indonesia masih dihadapkan oleh kompleksitas persoalan didalamnya, maka kota-kota lain di dunia dengan cepat bergerak menjadi kota berkelanjutan dengan cita rasa internasional. Semisal negeri jiran Malaysia, kebijakan memindahkan ibu kota dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya merupakan salah satu upaya untuk mengurangi “beban” Kuala Lumpur sebagai kota yang berkembang pesat dan menciptakan sebuah kota pemerintahan yang bertaraf internasional.

Dari serangkaian fenomena perkotaan yang penulis sajikan di atas maka penulis akan melakukan penelitian dengan mengambil judul: “Sengkarut Perkotaan: Prospek dan Tantangan Kebijakan Pembangunan Perkotaan Nasional di Indonesia”.

II. Rumusan Masalah

Maka mengingat kemunduran lingkungan kota yang terjadi di Indonesia dan didasarkan oleh konstruksi pemikiran yang penulis bangun pada bagian pendahuluan, rumusan masalah yang penulis ambil adalah “Bagaimana konsep kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan nasional di Indonesia ?”

III. Tujuan Penelitian

Pilihan untuk mengkaji rumusan masalah tersebut ditujukan untuk mengetahui formulasi dari kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan nasional di Indonesia.

IV. Metode Penelitian

Untuk mengeksplorasi rumusan masalah tersebut maka metode deskriptif menjadi pilihan penulis dengan mengumpulkan informasi yang aktual dan relevan secara rinci dari data sekunder, dalam rangka mendapatkan gambaran yang utuh terkait konsep kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan nasional di Indonesia.

V. Tinjauan Pustaka

5.1. Perkotaan (Urban)

Perkotaan dalam bahasa Inggris disebut *urban*, berasal dari bahasa Latin yakni "Urbanus" yang berarti karakteristik, atau berkaitan dengan kota. Maka jika merujuk dari arti tersebut pemaknaan perkotaan menjadi luas, tidak hanya terbatas sebagai wadah (kota) lebih dari itu, perkotaan bermakna ruang beserta kompleksitas dan dinamika didalamnya.

Selanjutnya John J. Macionis and Vincent N. Parrillo (2013: 3) menyebutkan bahwa terdapat berbagai kriteria yang berbeda untuk menentukan daerah perkotaan hampir di 200 negara yang kemudian melingkupi berbagai dialektika perkotaan. Adapun berikut kriteria daerah perkotaan sebagaimana dimaksud: "*However, are the varying criteria for defining an urban area that exist among the nearly 200 countries with urban populations. These criteria include:*

1. *Administrative function (a national or regional capital);*
2. *Economic characteristics (more than half the residents in non-agricultural occupations);*
3. *Functional nature (existence of paved streets, water supply, sewerage, and electrical systems);*
4. *Population size or population density (the number of people living within a square mile or kilometer)."*

Pertama, fungsi administratif. Kriteria ini merupakan penekanan bahwa daerah perkotaan merupakan modal nasional maupun kawasan dalam konteks pembangunan, maka tidak berlebihan ketika menjadikan daerah perkotaan sebagai barometer keberhasilan maupun wajah suatu negara dan menjadi mesin pertumbuhan nasional. Kedua, karakteristik ekonomi. Dalam kriteria ini disebutkan bahwa lebih dari separuh penduduk yang mendiami wilayah perkotaan tidak bekerja dalam sektor pertanian, hal ini mudah dipahami mengingat proses industrialisasi.

Ketiga, sifat fungsional. Sifat fungsional dari daerah perkotaan dimaknai dengan keamanan infrastruktur seperti jalan beraspal, pasokan air, saluran air limbah dan sistem kelistrikan yang mana hal tersebut acap kali menjadi pembeda dengan terminologi perdesaan. Keempat, ukuran/jumlah populasi atau kepadatan populasi, kepadatan jumlah penduduk inilah yang acapkali dijadikan patokan utama untuk menentukan daerah perkotaan.

Dari ke empat fungsi yang sekaligus menjadi kriteria daerah perkotaan sebagaimana dimaksud di atas, maka penekanan dari John J. Macionis dan Vincent N. Parrilo bahwa dalam menentukan suatu wilayah ke dalam kategori daerah perkotaan sekurang-kurangnya harus mencakup empat hal yakni: wilayah tersebut menjadi mesin pertumbuhan nasional, sebagian besar penduduk tidak bekerja di sektor pertanian, keamanan infrastruktur dan jumlah/kepadatan populasi.

Lantas pertanyaannya kemudian, apa definisi dari kota itu sendiri? Malcom Miles dan John R. Short dalam bagian pertama dari buku yang berjudul *Cities and Cultures* menggambarkan kota sebagai berikut: *“Cities are large, densely populated human settlements, often with a degree of governmental autonomy from the national state. They have been hubs of trade and transport, defensive outposts and centres of manufacturing and cultural production”*. Dari definisi tersebut menunjuk bahwa kota merupakan daerah dengan teritori besar, berpenduduk padat, otonom, sebagai pusat perdagangan dan transportasi, garda terdepan pertahanan dan sentra manufaktur dan pembauran budaya.

5.2. Terminologi Pembangunan

Pembangunan merupakan diksi yang tidak asing lagi kita dengar, bahwa upaya untuk memperbaiki suatu kondisi kehidupan masyarakat merupakan esensi dari pembangunan itu sendiri. Kendati demikian perubahan dari pembangunan acap kali dinilai secara material/ ekonomi seperti pada istilah mengubah nasib, dimana dikatakan berubah jika secara ekonomi mengalami pertambahan pendapatan atau penghasilan. Maka dalam kondisi ini pemahaman akan pembangunan lebih dimaknai dalam pertumbuhan ekonomi sebagaimana pemahaman pembangunan dalam beberapa dekade lalu.

Secara etimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pembangunan berasal dari kata “bangun” yang berarti bangkit atau berdiri. Sedangkan menurut Katz dalam Agus Suryono (2010: 3) pembangunan merupakan perubahan sosial yang besar dari suatu keadaan dengan keadaan lainnya yang dipandang lebih bernilai. Apa yang dipandang lebih bernilai itu adalah sifat spesifik dari waktu ke waktu, dari budaya yang satu ke budaya yang lain atau dari negara yang satu ke negara yang lain.

Masih dalam rujukan yang sama, Tjokroamidjojo menterjemahkan pembangunan sebagai proses pembaharuan yang kontinyu dan terus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Sedangkan menurut Rogers bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial alam suatu masyarakat, yang diselenggarakan dengan jalan memberi kesempatan yang seluas luasnya pada warga masyarakat untuk berpartisipasi, untuk mendapatkan kemajuan baik secara sosial maupun material bagi mayoritas warga masyarakat dengan mengendalikan lingkungan hidup mereka secara lebih baik (termasuk masalah pemerataan, kebebasan, dan berbagai masalah kualitas hidup yang lain).

Dengan merujuk dari berbagai definisi di atas, bahwa titik tekan dari konsep pembangunan adalah suatu proses yang berkelanjutan dalam rangka menuju keadaan yang lebih baik atau bernilai dan tidak terbatas kepada aspek materil, dengan memperluas partisipasi masyarakat. Lebih dari yang sekedar penulis pahami terkait definisi ini, secara terpisah kemudian Agus Suryono (Guru Besar FIA Universitas Brawijaya) menjelaskan bahwa dalam pembangunan (development) terkandung 3 unsur, yakni:

1. Perubahan, yaitu perubahan dari sesuatu yang dianggap masih kurang menuju kesempurnaan;
2. Tujuan, yaitu tujuan yang diarahkan dari, oleh, dan untuk rakyat (manusia) menuju pelestarian, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang lebih baik; dan
3. Potensi, yaitu potensi masyarakat yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri yang kemudian dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Lebih dari sekedar definisi – definisi, dalam mendalami konsep pembangunan juga harus kita pahami berbagai paradigma pembangunan yang dijadikan acuan dalam setiap generasi yang berbeda. Dimana perbedaan paradigma tersebut ditengarai oleh perbedaan cara pandang maupun perubahan ekologi yang drastis sehingga paradigma yang satu dapat menggantikan atau juga dapat sebagai komplementer dari paradigma yang lain.

Menyoal paradigma pembangunan, dalam buku Imam Harjanto (2011: 37 – 39) yang berjudul “Teori Pembangunan” sekurang kurangnya terdapat 3 paradigma pembangunan sebagai berikut:

1. *Production – centered development*, berorientasi pada paradigma pertumbuhan. Dimana pola pikir para perumus kebijakan dalam paradigma ini memiliki karakteristik seperti: (i) berorientasi pada peningkatan taraf hidup yang diukur dari kenaikan nilai ekonomi barang dari jasa yang diproduksi serta kenaikan tingkat konsumsi masyarakat; (ii) konsentrasi pada kepemilikan alat produksi; (iii) dominasi mekanisme pasar dalam menentukan jenis, kuantitas dan

kualitas barang dari jasa yang diproduksi; (iv) optimalisasi pemanfaatan kapital; (v) sistem perencanaan yang sentralistis.

2. *Welfare paradigm* (paradigma kesejahteraan), muncul pada era 1970 yang menjajikan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Komitmennya adalah melaksanakan sejumlah besar program yang akan mengantarkan buah pembangunan kepada sebagian besar anggota masyarakat dalam waktu yang sesingkat mungkin, melalui jalur yang selangsiung mungkin terutama sekali sengan cara meningkatkan akses mereka kepada berbagai pelayanan publik dan penyuluhan. Pendekatannya adalah melalui pendisainan program yang memberi paket teknologi, sarana produksi (bibit, insektisida, pupuk dlsb.), dana, logistik, dari sistem pemasaran serta subsidi yang diharapkan dapat mendorong masyarakat tumbuh dan sejahtera. Akan tetapi, pendekatan yang cenderung memandang rakyat sebagai objek amaliah melalui *charity strategy*, pendekatan patronizing, asuh (nurture) dari proteksi ini semakin meningkatkan depedensi masyarakat terhadap birokrasi dan menjadi kendala bagi tercapainya pembangunan berkelanjutan (sustained development).
3. *People – centered development*, paradigma ini lahir pada era 1980 yang merupakan reaksi dari paradigma kesejahteraan yang kemudian melandasi wawasan Pengelolaan Sumber Daya Lokal (PSDL) atau *Community – Based Resourse Management*. Pusat perhatian dari paradigma ini adalah perkembangan manusia (human-growth), kesejahteraan (wellbeing), keadilan (equity) dan keberlanjutan (sustainability). Logika yang mendominasi paradigma ini adalah keseimbangan ekologi manusia (balanced human ecology): sumber pembangunannya yang utama adalah informasi dan prakarsa yang kreatif yang tidak akan pernah habis; dari tujuannya yang utama adalah perkembangan manusia dalam artiaktualisasi yang optimal dari potensi manusia (Korten, 1984). Paradigma ini memberikan peranan kepada individu bukan sebagai objek, akan tetapi sebagi pelaku (aktor) yang menentukan tujuan yang hendak dicapai, menguasai sumber – sumber, mengarahkan proses yang menentukan hidup mereka. Karenanya paradigma ini memberi tempat yang penting bagi prakarsa dan keaneka ragaman lokal yang menekankan kemandirian (self – reliant communities) sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri.

Dari ke tiga paradigma di atas terlihat jelas perbedaan diantara ketiganya, dimana masing – masing paradigma memiliki perbedaan fokus. Paradigma pertumbuhan terfokus kepada peningkatan dari hasil produksi, paradigma kesejahteraan terfokus kepada pelayanan yang menghendaki rentang yang singkat melalui *charity strategy* yang berdampak kepada

ketergantungan masyarakat, serta paradigma terpusat ke manusia yang mengambil fokus pada isu kemandirian melalui pengembangan kreatifitas masyarakat dan penguatan komitmen dimana pemerintah bertindak sebagai fasilitator. Dengan demikian, perbedaan fokus sebagaimana dimaksud akan berdampak kepada perbedaan indikator dalam mengukur keberhasilan suatu pembangunan itu sendiri.

Pada konteks yang lebih umum, Arief Budiman (1995:2-9) memetakan 5 ukuran dalam menakar pembangunan sebagai berikut :

1. Kekayaan Rata-rata.

Mulanya pembangunan dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi dimana sebuah masyarakat dianggap berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara tersebut tiap tahunnya yang dalam bahasa teknis ekonomi diukur oleh Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP) dan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestik Produk (GDP).

2. Pemerataan.

Kekayaan keseluruhan yang dimiliki atau diproduksi oleh sebuah bangsa, tidak berarti bahwa kekayaan itu merata dimiliki oleh semua penduduknya. Bisa terjadi, sebagian kecil orang di dalam negara tersebut memiliki kekayaan yang berlimpah, sedangkan sebagian besar hidup dalam kemiskinan. Oleh karenanya, timbul keinginan untuk memasukkan aspek pemerataan dalam ukuran pembangunan, bukan lagi hanya PNB/Kapita saja. Dengan demikian dapat dikatakan, bangsa atau negara yang berhasil melakukan pembangunan adalah mereka yang disamping tinggi produktivitasnya, penduduknya juga makmur dan sejahtera secara relatif merata.

3. Kualitas Kehidupan.

Salah satu cara lain untuk mengukur kesejahteraan penduduk sebuah negara adalah dengan menggunakan tolak ukur PQLI (Physical Quality of Life Indeks). Tolak ukur ini pertama kali diperkenalkan oleh Moris yang mengukur 3 indikator, yakni: (i) Rata-rata harapan hidup sesudah umur satu tahun; (ii) Rata – rata jumlah kematian bayi; (iii) Rata – rata prosentasi buta dan melek huruf. Tentu saja, tolak ukur PQLI juga mengalami banyak kritik dan hemat penulis pada kontek kekikian, banyak sekali satuan ukur yang dapat digunakan untuk memahami tingkat pembangunan. Maka sebagaimana dimaksudkan oleh Arief Budiman bahwa mengangkat tolak ukur PQLI ditujukan untuk menunjukkan bahwa pembangunan bukan sekedar penambahan kekayaan material saja yang diukur secara makro disamping kompleksitas yang ada didalamnya.

4. Kerusakan Lingkungan.

Sebuah negara yang tinggi produktivitasnya dan merata pendapatan penduduknya, bisa saja berada dalam sebuah proses untuk menjadi semakin miskin. Hal tersebut dikarenakan proses pembangunan yang tidak memperdulikan dampak terhadap lingkungannya semisal pabrik yang menghasilkan limbah kimia, dimana pada konteks ini pembangunan tidak bisa berkelanjutan (suistunable). Untuk apa hari ini pembangunan maju sedangkan beberapa tahun mendatang akan terjadi krisis akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh pembangunan yang tidak memperhatikan faktor lingkungan. Karenanya, kriteria pembangunan harus juga memasukan faktor lingkungan dalam ukuran keberhasilan dari pembangunan itu sendiri.

5. Keadilan Sosial dan Kestinambungan.

Semula tolak ukur keberhasilan pembangunan hanya memberikan penekanan pada tingkat produktifitas saja, maka pemerataan dan isu lingkungan menjadikan pembangunan menjadi kompleks dimana kedua hal ini merepresentasikan nilai keadilan sosial (pemerataan pendapatan) dan kestinambungan (faktor lingkungan).

Dalam literatur yang berbeda dan pada kurun waktu yang relatif lama, secara spesifik Bintarto Tjokroamidjojo & Mustopadidjaja (1980: 73 – 70) memetakan berbagai masalah pokok pembangunan di Indonesia. Jika diperhatikan dengan seksama, masalah yang dipetakan hampir 40 tahun lampau ternyata masih relevan dengan berbagai persoalan pembangunan hari ini. Apakah masalah ini tidak dipahami sejak lampau, ataukah kegagalan para pengambil kebijakan dari waktu ke waktu dalam menuntaskan masalah pembangunan. Adapun berikut ini masalah – masalah pembangunan di Indonesia sebagaimana dimaksud :

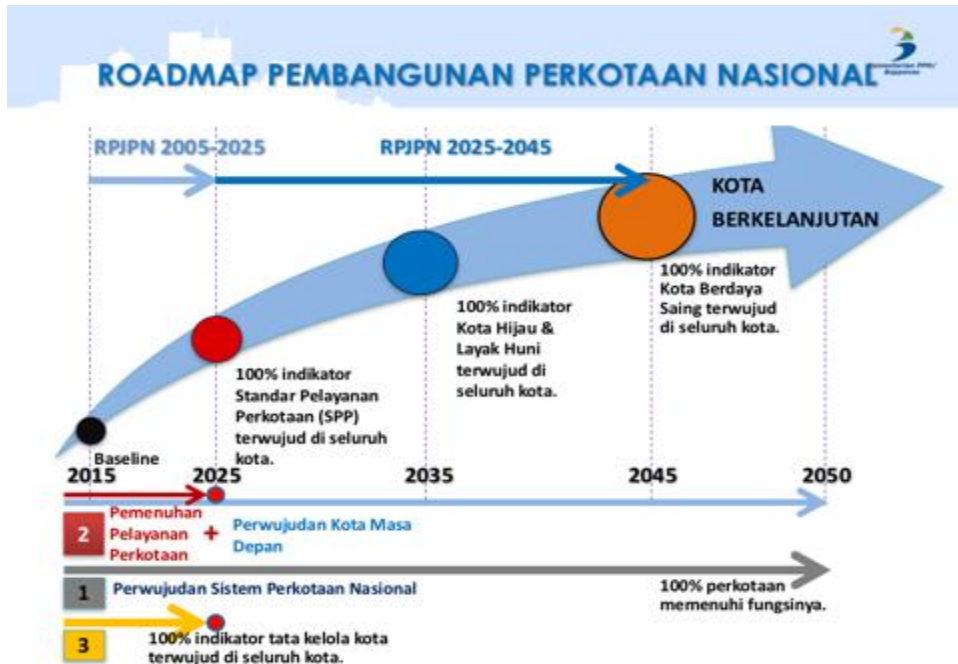
1. Masalah kependudukan (kepadatan, penyebaran, angkatan dan lapangan kerja, pangan dan pendidikan).
2. Masalah pengelolaan sumber – sumber alam.
3. Pertumbuhan ekonomi dan pembiayaan pembangunan.
4. Perkembangan ekonomi dan masalah pemerataan.
5. Masalah – masalah institusional.
6. Masalah ekologi internasional.

VI. Pembahasan

Indonesia menatap kedepan, ditengah realitas perkotaan Indonesia semangat menghadirkan daerah perkotaan bertaraf dunia diawali dengan perumusan Visi dan Misi menjadi Kota Berkelanjutan dan Berdayasaing di tahun 2045. Dimana target tersebut kemudian selingkung didalam dua tahap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), mulai 2005 – 2025 (baseline 2015) dilanjutkan kemudian 2025 – 2045 yang secara spesifik

dipetakan dalam Roadmap pada Gambar 6.1 sebagai sebagaimana publikasi Kementerian PPN/Bappenas berikut ini:

Gambar 6.1
Roadmap Pembangunan Perkotaan Nasional



Sebagai bagian dari komunitas dunia, target akan hadirnya kota berkelanjutan dan berdayasaing sejalan dengan 17 Agenda Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal`s) yang ditetapkan Perserikataan Bangsa-Bangsa meski target yang ditetapkan PBB lebih cepat yakni di tahun 2030. Dimana dalam website resmi PBB – www.un.org dicantumkan bahwa agenda ke-11 dari SDG`s adalah “Sustainable Cities and Community”.

Spesifiknya, Kementerian PPN/Bappenas menyebutkan Visi Kota 2050 adalah Kota Berkelanjutan dan Berdayasaing untuk Kesejahteraan Masyarakat. Lebih lanjut bahwa tipologi kota dimaksud dibangun atas tiga komposisi utama yakni:

1. Kota yang nyaman, aman dan layak huni. Komposisi kota dimaksud memfokuskan perhatian kepada bidang lingkungan kota, pendidikan, kesehatan, transportasi, sosial budaya hidup dan keamanan;

2. Kota yang hijau, berketahanan iklim dan bencana. Dimana memfokuskan kepada ruang kota, lingkungan kota, ketahanan sosial dan teknologi, infrastruktur dan perekonomian;
3. Kota yang berdayasaing berbasis teknologi – IT. Sedangkan pada komposisi ini difokuskan kepada bidang perekonomian, sumber daya manusia, pemerintahan, infrastruktur, lingkungan dan budaya hunian.

Dari ketiga komposisi kota sebagaimana dimaksud di atas, kesemuanya dimaksudkan dalam rangka membentuk identitas perkotaan Indonesia berbasis karakter fisik, keunggulan ekonomi dan budaya lokal disamping dalam rangka membangun keterkaitan dan manfaat antar kota dan desa-desa dalam sistem perkotaan nasional berbasis kewilayahan yang mana hal ini sebagaimana tercantum Gambar 6.2 dibawah ini:

Gambar 6.2
Visi Kota 2050



Sumber: KSPPN 2014.

Masih dalam sumber yang sama, Visi tersebut kemudian melahirkan Misi sebagaimana Gambar 6.3 berikut:

Gambar 6.3
Misi Kota 2050



Untuk memahami kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan secara holistik yang merupakan manifestasi dari Visi dan Misi yang ditetapkan, dapat kita temui dalam RPJMN 2015 – 2019 sebagaimana *roadmap* di atas dengan asumsi *baseline* di tahun 2015 yang dikhususkan dalam kerangka regulasi pembangunan wilayah perkotaan tahun 2015-2019. Dimana kerangka tersebut disusun untuk menyempurnakan berbagai peraturan perundangan terkait perkotaan sudah ada namun belum cukup mengakomodasi dan memberikan solusi bagi permasalahan dan tantangan perkotaan yang semakin kompleks dan bervariasi. Adapun kerangka regulasi pembangunan wilayah perkotaan tahun 2015-2019 yaitu:

1. Terkait isu belum terpenuhinya standar pelayanan minimum perkotaan: Rancangan PP Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan; Rancangan Perpres Lembaga Pembiayaan Infrastruktur Perkotaan.
2. Terkait permasalahan KBI KTI: Rancangan PP Pengelolaan Perkotaan, Rancangan Perpres Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional.

3. Terkait isu belum optimalnya tata kelola dan kelembagaan pemerintah daerah: Rancangan Perpres Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabotabek

Selanjutnya dalam Buku II RPJMN 2015 – 2019 tentang Agenda Pembangunan Bidang, selain urbanisasi isu strategis yang dipetakan pemerintah mencakup empat hal yakni:

1. Kesenjangan yang tinggi antarkota dan pusat pertumbuhan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta antara kota-kota di Pulau Jawa-Bali dengan di luar Pulau Jawa-Bali;
2. Masih belum terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) di kota dan kawasan perkotaan, sehingga menjadi kurang layak huni;
3. Rendahnya daya saing kota serta ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan kota terhadap perubahan iklim dan bencana; dan
4. Belum optimalnya pengelolaan perkotaan, terutama di kawasan perkotaan metropolitan dan kawasan perkotaan yang terletak di kabupaten.

Berdasarkan isu strategis tersebut, kemudian pemerintah memfokuskan arah kebijakan pembangunan perkotaan kedalam 2 hal yakni penguatan tata kelola pembangunan perkotaan dan pengembangan wilayah. Penguatan tata kelola pembangunan perkotaan diuraikan dengan 12 agenda dalam rangka membangun sistem dengan simplifikasi sebagai berikut: penyusunan regulasi terkait pengelolaan perkotaan, Standar Pelayanan Perkotaan (SPP), kebijakan perkotaan; sistem pengendalian dan fasilitasi pengelolaan, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kapasitas kelembagaan dan kemitraan serta pembiayaan infrastruktur.

Sedangkan untuk pengembangan wilayah pemerintah membagi berdasarkan tiga *cluster* dengan agenda yang memiliki beberapa perbedaan ditengah kesamaan, adapun *cluster* dimaksud yakni wilayah perkotaan metropolitan dan besar, wilayah perkotaan sedang dan kecil dan kawasan perkotaan dikabupaten. Dimana dari ketiga *cluster* agenda yang perlu digarisbawahi adalah membangun kota hijau (green city), kota berketahanan iklim dan bencana (resilient city), kota berbasis sosial budaya (heritage city), kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi (smart city) serta merencanakan dan menyediakan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP).

Disamping hal tersebut, dalam kebijakan pengembangan wilayah muncul juga isu revitalisasi kelembagaan. Dimana salah satu isu yang perlu digarisbawahi adalah terbangunnya sinergitas dari tingkat pusat hingga tingkat daerah dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari tahap penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan sampai dengan tahap evaluasi.

Isu selanjutnya yakni penguatan kerangka hukum, penyediaan pendanaan, menyusun instrumen pembangunan kota dan kawasan perkotaan, manajemen lahan perkotaan, mengembangkan dan menyediakan basis data informasi, mengembangkan simpul transportasi antar PKN dan PKW serta membangun kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif dan produktif. Sedangkan spesifik untuk kawasan perkotaan di kabupaten satu hal yang menarik untuk dicatat bahwa pemerintah merencanakan dan mengembangkan Kota Baru publik yang mandiri dan terpadu di sekitar kota atau kawasan perkotaan metropolitan.

Kemudian di dalam Buku III tentang Agenda Pembangunan Wilayah, arah kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan secara spesifik di kerucutkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Pokok Pengembangan Wilayah dengan target sebagai berikut:

1. Pembangunan 5 Kawasan Metropolitan baru di luar Pulau Jawa – Bali sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang diarahkan menjadi pusat investasi dan penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya guna mempercepat pemerataan pembangunan di luar Jawa.
2. Peningkatan peran dan fungsi sekaligus perbaikan manajemen pembangunan di 7 Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada untuk diarahkan sebagai pusat kegiatan berskala global guna meningkatkan daya saing dan kontribusi ekonomi.
3. Pengembangan sedikitnya 20 kota otonom di luar Pulau Jawa – Bali khususnya di KTI yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi ke Pulau Jawa yang diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya serta menjadi percontohan (best practices) perwujudan kota berkelanjutan;
4. Pembangunan 10 kota baru publik yang mandiri dan terpadu di sekitar kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa – Bali yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah serta diarahkan sebagai pengendali (buffer) urbanisasi di kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa-Bali.

Setelah kita mengetahui arah kebijakan dan sasaran dalam pembangunan perkotaan dalam RPJMN 2015 – 2019 maka selanjutnya yang penting juga untuk diketahui adalah terkait strategi yang merupakan penjabaran langkah dalam pembangunan perkotaan itu sendiri. Adapun strategi dimaksud terdapat di dalam Buku III tentang Agenda Pembangunan Wilayah sebagai berikut :

1. Perwujudan sistem perkotaan nasional (SPN);
2. Percepatan pemenuhan standar pelayanan perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni;
3. Perwujudan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana;
4. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi

dan budaya lokal;

5. Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan
Untuk memudahkan memahami pemetaan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dalam RPJMN 2015 - 2019, maka penulis mengkonstruksi ke dalam gambar 4.3 sebagaimana dibawah ini:

Gambar 4.3
Pemetaan Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia



VII. Simpulan dan Saran

Merujuk konsep pembangunan sebagaimana dalam bagian tinjauan pustaka pada penulisan ini, yang mensyaratkan pembangunan sebagai suatu proses yang berkelanjutan (*sustainable*) dalam rangka menuju keadaan yang lebih baik/bernilai, tidak terbatas kepada aspek materil (*multidimensional*) serta memperluas partisipasi masyarakat (Independent). Maka Visi dan Misi Kota 2015 sejatinya telah sejalan dengan konsep tersebut dengan menargetkan terbangunnya identitas perkotaan yang berbasis karakter fisik, ekonomi, budaya lokal serta membangun keterkaitan dan manfaat antar kota dan desa – kota.

Konsistensi atas corak pembangunan juga tergambar jelas dalam kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dalam RPJMN 2015 – 2019, atas upaya mewujudkan sistem perkotaan nasional (SPN), standart pelayanan

perkotaan (SPP), perwujudan kota hijau dan cerdas serta peningkatan kapasitas tata kelola perkotaan baik dalam aspek kelembagaan maupun sumber daya manusia. Namun, yang sekaligus menjadi menjadi kritik penulis dalam kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan nasional bahwa sasaran yang ditentukan terlalu ambisius dengan pekerjaan yang terlalu banyak sedangkan waktu yang terlalu singkat (*too much too soon*).

Sebagai penutup dalam penulisan ini, saran dari penulis hendaknya pemerintah menentukan prioritas terlebih ketika dukungan keuangan negara yang tidak stabil disamping konsistensi antara strategi pembangunan dengan program yang semestinya dijalankan. Dimana kritik atas konsistensi ini lahir dari fakta bahwa bagaimana program infrastruktur di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo luar biasa didorong, seolah mengabaikan faktor lingkungan, sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota.

Daftar Pustaka

Buku

Bintarto. (1989). *Interaksi Desa-Kota*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Budiardjo, Miriam. (2000). *Dasar- Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Budiman, Arief. (1995). *Teori Pembangunan Dunia Ke Tiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Damsar dan Indrayani. (2017). *Pengantar Sosiologi Perkotaan*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.

Harjanto, Imam. (2011). *Teori Pembangunan*. Malang: UB Press.

Kuswartojo, Tuk. (2005). *Perumahan dan Pemukiman di Indonesia*. Bandung: ITB.

Lindert, Peter H. And A. Pugel, Thomas. (1996). *International Economics – 10th ed.* USA: Michael W. Junior.

Macionis, John J. and N. Parrillo, Vincent. (2013) *Cities and Urban life*. USA: Pearson.

Miles, Malcom. dan R. Short, John. (2007). *Cities and Cultures*. New York: Routledge.

Rasyid, Ryaas. (1997). *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Yarsif Watampone.

Suryono, Agus. (2010). *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press.

Tjokroamidjojo, Bindoro. Dan Mustopadidjaja. (1980). *Pengantar Pemikiran Tentang Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.

Dokumen:

Buku I, II & III RPJMN 2015 – 2019.
KSPPN 2014.

Media Online

m.detik.com.

m.greenpeace.org.

www.bps.go.id.

www.kemendagri.go.id.

www.otosia.com.

www.un.org.